

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus dilihat dari sejauh mana pembangunan itu mampu menekan tingkat kemiskinan, memperkecil Ketidaksetaraan sosial, dan mengangkat standar hidup penduduk. Pembangunan yang dapat dikatakan berhasil adalah pembangunan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat rentan dan marginal, serta menjamin distribusi hasil pembangunan yang lebih adil dan merata. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi indikator penting yang merefleksikan keberhasilan atau kegagalan suatu wilayah dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif (Guampe et al., 2022)

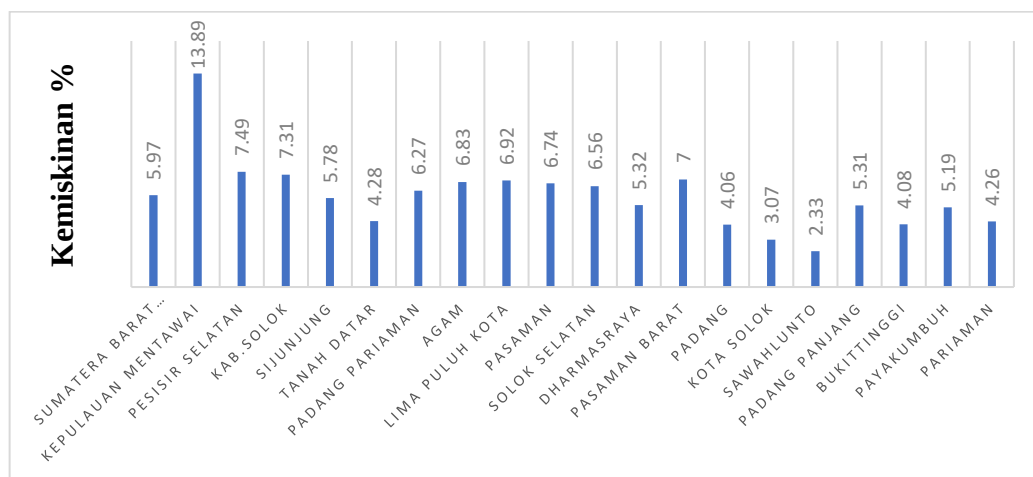
Kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai kekurangan pendapatan, melainkan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Kondisi ini tidak semata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pembelajaran yang bermutu yang layak, pelayanan kualitas hidup dari sisi jasmani dan usia harapan hidup yang memadai, kesempatan kerja yang produktif, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, transportasi, dan sanitasi. Untuk itu, antisipasi kemiskinan dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor, tidak selalu fokus pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan manusia, keadilan sosial, serta pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dalam kerangka tersebut, kemiskinan seharusnya dipahami bukan sekadar akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai refleksi dari ketimpangan kesempatan dan kelemahan dalam tata kelola serta institusi pembangunan (Fitri Ani Dwi Lusiana et al., 2024).

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang memperlihatkan karakteristik khas dari aspek geografis, sosial, dan ekonomi. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 42.012 km² dan terdiri atas 19 kabupaten/kota, daerah ini dikenal melalui kekayaan budaya Minangkabau serta memiliki kekayaan alam yang beragam, meliputi komoditas agraria, hasil laut, perkebunan rakyat, serta potensi wisata alam. Walaupun memiliki basis ekonomi yang cukup potensial, cukup besar, Provinsi Sumatera Barat masih dihadang pada berbagai tantangan pembangunan, seperti ketimpangan antarwilayah, tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian dan upaya strategis dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan (Akmal et al., 2023).

Secara umum, tren kemiskinan di Sumatera Barat selama periode 2019-2024 menunjukkan penurunan, namun dengan dinamika yang beragam antar wilayah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa proporsi masyarakat berpenghasilan rendah provinsi ini berada di kisaran 6% sepanjang periode tersebut. Dimana pada bulan Maret 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,42% (348,22 ribu jiwa), turun menjadi 6,29% pada September 2019 (343,09 ribu jiwa). Memasuki tahun 2023–2024, angka kemiskinan cenderung stabil di kisaran 6,0%, dengan jumlah lapisan masyarakat kurang mampu sekitar 345 ribu jiwa dari ±5,75 juta jumlah penduduk pada Provinsi Sumatera Barat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, angka kemiskinan masih relatif tinggi di beberapa kabupaten, menandakan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, masih terdapat 9 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat angka kemiskinan tertinggi dengan (13,89%), disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar (7,49%), Kabupaten Solok tercatat sebesar (7,31%), dan Pasaman Barat tercatat sebesar (7,00%). Sementara itu, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam masing-masing mencatat angka (6,92%) dan (6,83%), diikuti oleh Kabupaten Pasaman (6,74%), Solok Selatan (6,56%), Padang Pariaman (6,27%), (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingginya tingkat

kemiskinan di wilayah-wilayah ini mencerminkan belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar, terbatasnya lapangan kerja produktif, serta lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di provinsi ini. Ketimpangan tersebut juga menandakan adanya tantangan besar dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara adil dan efisien ke daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah (Ramadhani & Aimon, 2024).



Grafik 1. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Grafik 1.1 yang memperlihatkan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok antar wilayah dalam hal capaian kesejahteraan. Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati posisi tertinggi dengan angka kemiskinan sebesar 13,89%, jauh melampaui daerah lainnya, dan hampir dua kali lipat dari Kabupaten Padang Pariaman yang tercatat pada urutan ke-9 dengan angka 6,27% (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa belum semua daerah memperoleh manfaat pembangunan secara merata, meskipun berada dalam wilayah administratif yang sama. Daerah-daerah seperti Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Pasaman Barat juga mencatat angka kemiskinan yang relatif tinggi, menunjukkan adanya hambatan struktural dalam pemerataan pembangunan (Ramadhani & Aimon, 2024). Faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti proses pembelajaran yang bermutu dan pelayanan medis, serta lemahnya struktur ekonomi lokal menjadi

tantangan utama dalam mendorong mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, grafik ini memperkuat urgensi dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap determinan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut, agar intervensi kebijakan dapat dirancang lebih kontekstual dan tepat sasaran (Aryangti & Sukardi, 2024).

Tingkat kemiskinan di daerah tertinggal memiliki keterkaitan erat dengan mutu pembangunan manusia. Rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah miskin umumnya disebabkan oleh terbatasnya peningkatan kompetensi yang memadai, pelayanan medis yang layak, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung aktivitas produktif. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan potensi manusianya. IPM mencakup tiga poin pokok, yaitu umur yang panjang dengan hidup sehat, tingkat proses pembelajaran yang bermutu, serta standar hidup yang bagus. Peningkatan nilai IPM menunjukkan adanya kemajuan dalam ketiga aspek tersebut, yang pada gilirannya dapat memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadila & Marwan (2020) di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa IPM memberikan kontribusi signifikan dalam arah yang berlawanan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin baik kualitas pembangunan manusia, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Namun demikian, pembangunan manusia yang baik tidak serta-merta menjamin terwujudnya kesejahteraan yang merata apabila tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang adil. Dalam hal ini, Gini Ratio menjadi indikator yang relevan untuk menilai tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio yang tinggi mencerminkan semakin besarnya jurang distribusi uang masuk antara orang yang kaya dan miskin. Penelitian Endrawati et al. (2023) menemukan bahwa Gini Ratio menunjukkan pengaruh yang kuat dan searah terhadap kemiskinan secara nasional pada periode 2017–2022. Temuan serupa juga disampaikan oleh Suhardi & Rival (2024) di Kota Parepare, yang menyatakan bahwa Gini Ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak nyata. Bahkan, menurut

(Anggraini & Warsitasari, 2023), menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sebagaimana terbukti di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan melalui Gini Ratio merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan.

Selain ketimpangan pendapatan, faktor lain yang turut memperburuk kondisi kemiskinan adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan sejauh mana masyarakat usia produktif dapat terserap dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Tingginya angka pengangguran menunjukkan belum optimalnya sistem ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, yang berdampak langsung terhadap daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Menurut temuan Sagala et al. (2022) TPT menunjukkan pengaruh yang kuat dan searah terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, yang menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat pengangguran akan semakin memperbesar kemungkinan masyarakat untuk terjerumus dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan integrasi antara pembangunan manusia dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif (Sagala et al., 2022).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini mampu menciptakan efek *trickle-down* bagi masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi bukan berarti berimplikasi menurunkan kemiskinan, terutama apabila pertumbuhan tersebut bersifat tidak merata. Penelitian oleh (Fitri & Aimon, 2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tidak secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan apabila tidak didukung oleh distribusi pendapatan yang adil dan akses yang setara terhadap kegiatan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa penting untuk mengkritisi kualitas pertumbuhan, bukan sekadar kuantitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat justru memperlebar kesenjangan, karena hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak menyentuh masyarakat miskin yang berada di sektor informal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah tertinggal merupakan hasil dari interaksi kompleks antara rendahnya pembangunan manusia, terbatasnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun secara umum IPM di Sumatera Barat cukup tinggi, ketimpangan antar wilayah menandakan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara adil. Beberapa daerah masih tertinggal jauh dalam indikator proses pembelajaran yang bermutu, pelayanan medis, maupun pendapatan. Oleh sebab itu, analisis yang menyeluruh terhadap keterkaitan antara IPM, TPT, dan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk memahami akar permasalahan kemiskinan yang masih ada di kabupaten tertentu di Sumatera Barat.

Selain itu, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Guampe et al., 2022), dinamika pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua unsur penting yang berdampak pada tingkat kemiskinan secara nasional di Indonesia pada periode 2001–2021. Penelitian tersebut menggunakan data time series nasional dan metode regresi linier berganda, serta menemukan bahwa pengangguran terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama pembangunan, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif. Namun, penelitian Guampe et al. masih terbatas pada pendekatan makro nasional dan belum mengeksplorasi faktor-faktor pembangunan manusia yang lebih mendalam serta variasi antar wilayah yang signifikan dalam konteks regional.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan mengadopsi pendekatan yang lebih spesifik secara spasial dan komprehensif secara variabel. Penelitian ini fokus pada 9 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan melampaui tingkat rata-rata kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Selain mengkaji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dalam studi Guampe et al. (2022) penelitian ini juga memasukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi cerminan kualitas hidup dari sisi proses pembelajaran yang

bermutu, pelayanan medis, dan standar hidup layak. Penambahan IPM dalam model penelitian bukan hanya sebagai pengayaan variabel, tetapi sebagai respons terhadap kritik terhadap pendekatan makro konvensional yang belum sepenuhnya menangkap kompleksitas determinan kemiskinan dalam kerangka teoritis kapabilitas dan struktural.

Menanggapi keterbatasan dalam penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada pendekatan makro atau mengabaikan ketimpangan sebagai dimensi penting kemiskinan, studi ini mengusulkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual secara wilayah dan lebih komprehensif secara variabel. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di 9 Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa hanya terdapat 9 objek Kabupaten yang terdapat pada riset ini dikarenakan dalam data Badan Pusat Statistik 9 Kabupaten tersebut mempunyai angka persentase kemiskinan di atas (6%). dan rata rata kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019-2024 tercatat sebesar (6%) (Badan Pusat Statistik, 2024).

Penambahan variabel ketimpangan pendapatan menjadi penting mengingat bukti empiris menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang timpang turut memperparah kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Fokus pada kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk memperlihatkan uraian yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor struktural dan sosial yang mempengaruhi kemiskinan di daerah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat empiris dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kabupaten Termiskin di Provinsi Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah uraian identifikasi masalah, maka muncul beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat
4. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) terhadap pada 9 Kabupaten termiskin di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat bagi penulis

Dapat berfungsi sebagai acuan maupun rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kemiskinan.

2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dalam merumuskan upaya untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut.

3. Manfaat untuk akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus diyakini mampu mendorong penelitian berikutnya untuk memperbaiki serta melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

